



**PERATURAN BUPATI PATI**

**NOMOR 122 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TLOGOWUNGU**

**KABUPATEN PATI TAHUN 2017 - 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**TAHUN 2020**



**BUPATI PATI**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PATI**

**NOMOR 122 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TLOGOWUNGU**

**KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PATI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kegiatan dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang...

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

24. Peraturan...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
26. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 64);
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 50), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 12 Desember 2020

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 12 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19720424 199303 2 010

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN TLOGOWUNGU  
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022**

**DAFTAR ISI**

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I.1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I.2
1.2 Landasan Hukum .....	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I.3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I.4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>II.1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tayu .....	II.1
2.2 Sumber Daya Kecamatan .....	II.7
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan .....	II.16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan ..	II.27
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>III.1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tlogowungu.....	III.1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III.8
3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah .....	III.14
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan .....	III.17
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III.18
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV.1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tlogowungu	IV.1
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>V.1</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tlogowungu .....	V.1
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>VI.1</b>

6.1 Program dan Kegiatan .....	VI.1
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII.1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII.1</b>

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Hubungan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Lainnya	I-6
GAMBAR 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu	II-2
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Tlogowungu	II-13

## DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan	II-4
Tabel. 2.2.	Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan	II-7
Tabel. 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	II-7
Tabel. 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan	II-8
Tabel. 2.5.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	II-9
Tabel. 2.6.	Sarana Prasarana Kecamatan Tlogowungu	II-10
Tabel. 2.7.	Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Tlogowungu	II-13
Tabel. 2.8.	Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Tlogowungu	II-14
Tabel. 2.9.	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Tlogowungu	II-15
Tabel. 2.10.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Tlogowungu	II-15
Tabel. 2.11.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Tlogowungu	II-16
Tabel. 2.12.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tlogowungu	II-18
Tabel. 2.13.	Angka Kriminalitas di Kecamatan Tlogowungu	II-23
Tabel. 2.14.	Analisa Untuk Tantangan dan Peluang	II-28
Tabel. 2.15.	Analisis KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	II-31
Tabel. 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel. 3.2.	Data Dukung Masalah Pokok	III-4
Tabel. 3.3.	Data Dukung Masalah	III-5
Tabel. 3.4.	Data Dukung Akar Masalah	III-6
Tabel. 3.5.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Tlogowungu Kab. Pati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-9
Tabel. 3.6.	Telaah Renstra Perangkat Daerah	III-14
Tabel. 3.7.	Telaah KLHS terhadap Kecamatan Tlogowungu	III-17
Tabel. 3.8.	Hasil Analisa, Telaah dan Realisasi Kinerja Kecamatan	III-18
Tabel. 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tlogowungu	IV-2
Tabel. 5.1.	Peluang dan Pendorong penentuan Strategi dan arah Kebijakan	V-1
Tabel. 5.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-4
Tabel. 6.1.	Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan	VI-2
Tabel. 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruangan, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat( 2) mengamanatkan bahwa “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kecamatan Tlogowungu sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai kewajiban menyusun rencana strategis Kecamatan Tlogowungu.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RENSTRA 2017-2022, serta amanat peraturan perundangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tertera dalam pasal 343 ayat (9) PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan

kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Pasal tersebut sebagai dasar penyesuaian kegiatan dalam perubahan RENSTRA. Berikutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diamanatkan setiap Perangkat Daerah agar melaksanakan pemetaan dari program/kegiatan lama ke Program/kegiatan/sub kegiatan baru. Amanat tersebut mengakibatkan terjadinya perbaikan indikator kegiatan yang masih bersifat hasil aktivitas, hal tersebutlah yang mendasari adanya perbaikan dan penajaman indikator output serta penyesuaian target kegiatan dalam perubahan RENSTRA.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2018 tentang tentang Rencana Strategis Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud perubahan RENSTRA Kecamatan Tlogowungu**

Renstra Kecamatan Tlogowungu merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5(lima) tahun mendatang yang mana sudah dilaksanakan 2 (dua) tahun. Penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Tlogowungu untuk Tahun 2017–2022 ini dimaksudkan untuk:

- 1). Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2). Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Kecamatan Tlogowungu yang ditetapkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan.
- 3). Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus ditindaklanjuti dalam memenuhi Tujuan dan Sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.
- 4). Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun
- 5). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Tlogowungu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu: Tahun 2017–2022.

#### **1.3.2 Tujuan Perubahan RENSTRA Kecamatan Tlogowungu**

Perubahan Renstra Kecamatan Tlogowungu Tahun 2017 –2018 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Tlogowungu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Tlogowungu Tahun 2017–2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Kabupaten Pati dengan Renstra Kecamatan Tlogowungu Tahun 2017 – 2022.
- 2). Sebagai dasar menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di Wilayah Kecamatan Tlogowungu
- 3). Sebagai dasar pengukuran kinerja 5 (lima) tahun mendatang.
- 4). Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan perubahan Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang perubahan RENSTRA, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan PD terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada tahun yang sudah dilalui (2018, 2019) karena RENSTRA saat ini adalah RENSTRA perubahan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2020-2022.

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan PD Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kabupaten Pati.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD Kabupaten Pati dalam 5 (lima) tahun mendatang;

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah. .

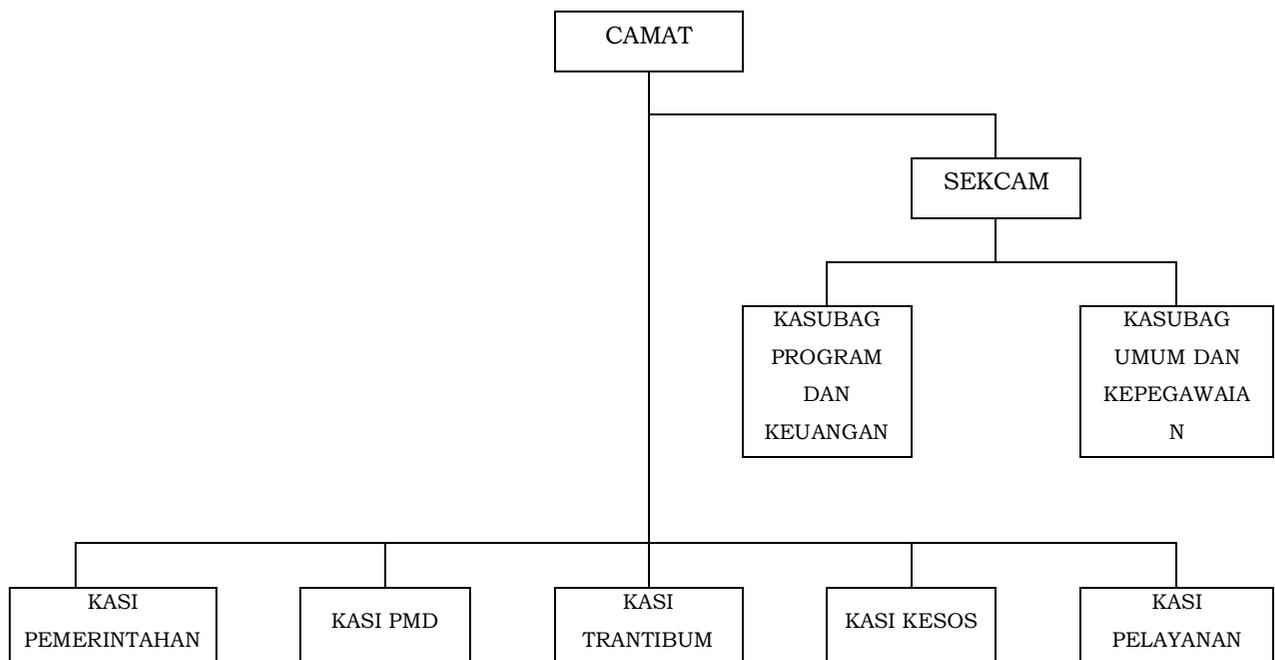
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu**

##### **2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Tlogowungu terdiri atas:

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)  
KANTOR KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI**



**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu**

**2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

**Tabel II.1.**  
**Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan**

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati.</li> <li>- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan.</li> <li>- Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.</li> </ul>
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat.</li> <li>- Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor</li> </ul>

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</li> </ul>
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.</li> <li>- Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan.</li> <li>- Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.</li> <li>- Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.</li> </ul>
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>- Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Memberhentikan anggota Badan</li> </ul>

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.</li> <li>- Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.</li> <li>- Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan.</li> <li>- Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.</li> <li>- Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.</li> <li>- Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</li> <li>- Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan.</li> <li>- Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan.</li> <li>- Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi</li> </ul>

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

**Tabel II.2.**

**Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan**

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2020

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Tlogowungu berjumlah 17 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Non PNS(THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel II.3**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Tlogowungu	2		4	3	6	2	17	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasubag Umum &	-	-	-	1	-	-	1	

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	Kepeg								
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Staf Kasubbag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	1	1	
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	1	1	
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	1	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	3	-	3	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2020.

**Tabel II.4**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tlogowungu	-	-	4	2	-	-	6	3	2	-	12	5
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Program &	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Keuangan												
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2020

**Tabel II.5**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan**

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Gol. I		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tlogowungu	2	-	4	4	2	1	1	-	3	-	12	5
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Ka Subbag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf PMD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf Subbag	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Gol. I		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Umum & Kep												
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2020

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

**Tabel II.6**

**Sarana Prasarana Kecamatan**

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	3	unit	Baik	
2	Ruangan	7	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	9	unit	6 baik, 3 kurang baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	6	unit	5 baik, 1 kurang baik	
6	- Laptop	7	unit	6 baik, 1 kurang baik	
7	- Printer	9	unit	9 baik, 2 kurang baik	
8	- Meja	39	unit	36 baik, 3 kurang baik	
9	- Kursi	43	unit	39 baik, 4 kurang baik	
10	- AC	10	unit	baik	
11	- Almari	14	unit	13 baik, 1 kurang baik	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
12	- Filling cabinet	9	Unit	6 baik, 3 kurang baik	

*Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2020*

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 10 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 3 unit dikarenakan 3 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 6 unit dengan 5 dalam kondisi baik, 1 kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 7 unit dengan 6 kondisi baik, dan 1 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka kedepan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 5 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 9 unit dengan 7 dalam kondisi baik, dan 2 kondisi rusak, maka kedepan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 39 unit dengan 36 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 43 unit dengan 39 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 10 unit dengan kondisi baik, , maka kedepan sudah tidak membutuhkan penambahan AC baru lagi.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 14 unit dengan 13 kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 9 unit dengan 6 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet* dan penggantian *filling cabinet* yang kurang baik dan rusak.

### **2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Tlogowungu**

#### **2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan**

Kecamatan Tlogowungu merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 9.446 Ha. Secara administratif Kecamatan Tlogowungu dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Gembong Kabupaten Jepara



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Tlogowungu

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Tlogowungu dapat dilihat dalam tabel II.7 berikut ini :

**Tabel II.7**  
**Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Tlogowungu**

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Tamansari	398	22	5	
2	Sambirejo	196	14	3	
3	Tlogorejo	361	28	4	
4	Purwosari	495	22	3	
5	Regaloh	624	14	6	
6	Wonorejo	666	23	4	

7	Tlogosari	680	28	4	
8	Sumbermulyo	439	16	3	
9	Guwo	463	27	6	
10	Tajungsari	1 059	34	6	
11	Lahar	542	21	6	
12	Suwatu	259	11	5	
13	Cabak	1 310	35	9	
14	Klumpit	340	8	2	
15	Gunungsari	1 615	18	5	

*Sumber: Kecamatan Tlogowungu dalam angka 2019*

#### 2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Tlogowungu memiliki jumlah penduduk sebanyak 51.181 jiwa, yang terdiri dari 24.909 jiwa laki-laki dan 26.051 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Tlogowungu tahun 2016 berjumlah 17.136 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 6,81 jiwa per hektar. Profil kependudukan Kecamatan Tlogowungu digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel II.8**

#### **Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Tlogowungu**

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	1.529	52,9	1.407	47,1	2.936	100
2	5-9	1.974	52,5	1.785	47,5	3.759	100
3	10-14	1.843	51,7	1.722	48,3	3.565	100
4	15-19	1.390	50,7	1.354	49,3	2.744	100
5	20-24	2.031	50,1	2.019	49,9	4.050	100
6	25-29	2.202	51,6	2.063	48,4	4.265	100
7.	30-34	1.930	50,6	1.888	49,4	3.818	100
8	35-39	1.973	48,1	2.132	51,9	4.105	100
9	40-44	2.187	49,1	2.263	50,9	4.450	100
10	45-49	1.950	49,8	1.963	50,2	3.913	100
11	50-54	1.858	47,3	2.074	52,7	3.932	100
12	55-59	1.854	49,4	1.899	50,6	3.753	100
13	60-64	1.651	51,7	1.543	48,3	3.194	100
14	65-69	1.080	55,4	870	44,6	1.950	100

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
15	70-74	640	49,6	651	50,4	1.291	100
16	75+	940	48,3	1.005	51,7	1.945	100

*Sumber: Kecamatan Tlogowungu dalam angka 2019*

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut:

**Tabel II.9**

**Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Tlogowungu**

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	6.411	6.508	12.919	28,60%
2	Belum tamat SD/MI	3.582	3.770	7.352	16,27%
3	SD/MI	7.954	7.734	15.688	34,73%
4	SMP/MTs	2.243	4.258	6.501	14,39%
5	SMA/SMK/MA	4.014	3.455	7.469	16,53
6	DI/DII	56	90	146	0,32%
7	DIII	143	221	364	0,80%
8	S1	598	580	1.178	2,60%
9	S2	33	20	53	0,12%
10	S3	-	2	2	0,004%

*Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019*

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut:

**Tabel II.10**

**Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Tlogowungu**

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	6.747	6.045	12.792	25,12%
2	Mengurus rumah tangga	5	7.787	7.792	15,30%
3	Pelajar/mahasiswa	3.001	2.106	5.107	10,03%
4	Pensiunan	147	57	204	0,40%
5	PNS	233	160	393	0,77%
6	TNI	26	-	26	0,05%

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
7	Polri	28	2	30	0,06%
8	Pedagang	89	163	252	0,49%
9	Petani/pekebun	4.896	2.887	7.783	15,28%
10	Peternak	8	2	10	0,001%
11	Nelayan	15	1	16	0,03%
12	Industri	3	4	7	0,01%
13	Konstruksi	15	0	15	0,03%
14	Transportasi	25	0	25	0,05%
15	Karyawan swasta	1.434	1.176	2.610	5,12%
16	Karyawan BUMN	55	20	75	0,15%
17	Karyawan BUMD	16	7	23	0,05%
18	Karyawan Honoror	51	26	77	0,15%
19	Buruh harian lepas	700	283	983	1,93%
20	Buruh tani	2.962	2.323	5.285	10,38%
21	Wiraswasta	5.007	2.420	7.427	14,58%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut:

**Tabel II.11**

**Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Tlogowungu**

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	26.646	26.236	52.882	98,53%
2	Kristen	345	359	704	1,31%
3	Katolik	23	18	41	0,08%
4	Hindu	3	1	4	0,007%
5	Budha	1	1	2	0,003%
6	Konghuchu	0	0	0	0
7	Aliran Kepercayaan	15	23	38	0,07%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan

Terkait dengan kinerja Kecamatan Tlogowungu selama dua tahun sebelumnya, menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Tlogowungu dalam kurun periode 2018-2019 sebagai berikut:

**Tabel II.12**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TLOGOWUNGU**  
**KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan		100%	100%	100%	100%	100	100
2	Persentase pos kampling aktif		60%	63%	23%	17%	38	27
3	Persentase anggota Linmas aktif		60%	65%	51%	74%	85	114
4	Rasio Poskamling		4.1	4.5	4.4	4.6	107	102
5	Rasio Anggota Linmas		0.03	0.03	0.03	0.03	100	100
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan		0.6000	0.6500	0.6050	0.6581	101	101
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100%	100%	100%	100%	100	100
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)		0.7300	0.7340	0.7330	0.7344	100	100
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)		0.6580	0.6622	0,6600	0.6650	100	100
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		0.5500	0.5778	0.5780	0.5900	105	102

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100%	100%	100%	100%	100	100
12	Persentase LPMD aktif		40%	50%	100%	100%	250	200
13	Persentase PKK desa aktif		82%	85%	100%	100%	121	117
14	Persentase Karang Taruna aktif		44%	48%	44%	48%	100	100
15	Persentase RT/RW aktif		73%	76%	73%	78%	100	102
16	Persentase Posyandu aktif		78%	78%	100%	100%	128	128
17	Persentase penyaluran rastra		100%	100%	100%	100%	100	100
18	Persentase penyaluran PKH		100%	100%	100%	100%	100	100
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)		100%	100%	100%	100%	100	100
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan		60%	65%	20%	50%	33	77
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		65%	70%	65%	87%	100	124
22	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes kabupaten		6%	8%	3%	6%	50	75

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100	100
24	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		55%	60%	75%	50%	136	83
25	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten		6%	8%	3%	6%	50	75
26	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		89%	90%	93%	87%	104	97
27	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100	100
28	Persentase keterisian data monografi kecamatan		78%	80%	75%	50%	96	63
29	Persentase keterisian data profil kecamatan		55%	60%	70%	60%	127	100
30	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa		65%	75%	75%	85%	115	113
31	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan		82%	85%	92%	97%	112	114

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu		91%	92%	92%	92%	101	100
33	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan		77%	79%	77%	85%	100	108
34	Pertumbuhan pemohon Paten		40	45	58	53	145	117
35	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100	100
36	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ( $(100\% < x < 100\%)$ ) terjadi pada tahun 2018 dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan, akan tetapi sudah ada peningkatan rasio pada tahun 2019. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan hasil baik ( $(100\% < x > 100\%)$ ) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelanggaran K3 bisa tertangani.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
- Indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan Dispendukcapil sehingga pelayanan bisa maksimal.
- Indikator Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten mengalami keberhasilan karena adanya penerapan sistem Pagu Indikator Kecamatan (PIK) yang merupakan pembatasan usulan ke tingkat Kabupaten untuk penjaringan skala prioritas.

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Kinerja pelayanan kecamatan Tlogowungu diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel II.13**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TLOGOWUNGU**  
**KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Pertumbuhan	
	4	5	4	5	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	191.833	229.412	191.833	194.279	100	84,68	9,17	0,60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	124.675	125.351	124.675	76.831	100	61,29	0,16	(11,67)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.600	26.775	9.600	9.600	100	35,85	4,19	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.911	6.550	5.911	4.918	100	75,08	0,15	(0,24)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.744	24.500	3.744	22.056	100	90,02	5,06	4,47
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	9.529	52.800	9.529	28.656	100	54,27	10,55	4,67

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Pertumbuhan	
	4	5	4	5	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	24.509	30.045	24.509	42.399	100	141,11	1,35	4,37
Program Pengembangan Data/ Informasi	-	19.000	-	10.061	-	52,95	4,64	2,45
Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	-	37.020	-	18.717	-	50,55	9,03	4,57
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	14.027	35.500	14.027	17.350	100	54,43	5,24	0,81
Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi	6.943	31.875	6.943	35.251	100	110,59	6,08	6,91
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	16.122	30.122	16.122	17.500	100	58,09	3,42	0,34
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	2.944	-	2.944	-	100	-	0,72	0,72



Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcome tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Dalam penentuan proyeksi anggaran di RENSTRA jumlah anggaran tiap – tiap perangkat daerah mengacu pada kapasitas riil anggaran di RPJMD yang mana struktur anggarannya sudah dibagi dalam (P1) untuk program wajib mengikat, (P2) untuk program prioritas dan (P3) program pendukung visi dan misi kepala daerah (P3). Program yang ada di Kecamatan Tlogowungu hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 penganggaran program ada yang seimbang dan kurang baik. Program pada tahun tersebut hampir 75% memiliki rasio yang seimbang ((100% (  $x = 100%$ )), dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai. Program yang 25% masuk kategori kurang baik ((100% (  $x > 100%$ )) terjadi pembengkakan anggaran, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan program yang mungkin disebabkan karena kurangnya data dan informasi yang ada.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2019 ditemukan bahwa program di Kecamatan Tlogowungu ada yang baik ((100% (  $x > 100%$ )) dan kurang baik ((100% (  $x > 100%$ )). Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hampir 75% yang rasio anggarannya bisa dianggap baik. Ketercapaian itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcome tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2019 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan RENJA sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tlogowungu**

### **2.4.1 Analisis RENSTRA Perangkat Daerah terhadap tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Tlogowungu**

Kecamatan Tlogowungu merupakan Perangkat Daerah yang termasuk dalam urusan penunjang kewilayahan, dimana urusan tersebut berfungsi menunjang pelayanan masyarakat yang mendukung keberhasilan visi dan misi kepala daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang. Kecamatan Tlogowungu memberikan dukungan terhadap Misi I untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, Misi III untuk pemberdayaan masyarakat dan Desa, Misi IV untuk perencanaan, dan Misi VI untuk Penanaman modal. Dari analisa RENSTRA Perangkat Daerah dengan urusan diatas mempunyai kesamaan sasaran dalam mendukung tujuan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun, capaian sasaran yang hampir sama secara tidak langsung juga merupakan tanggungjawab Kecamatan Tlogowungu dalam memberikan kontribusi capaian kinerja terhadap perangkat daerah tersebut, kinerja sasaran meliputi :

- 1) Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten dengan target capaian akhir 88
- 2) Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dengan target capaian akhir 99%
- 3) Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD dengan target capaian akhir 100%
- 4) Lama Proses Perizinan dengan target capaian akhir 3 hari
- 5) Persentase Surat Keterangan Pindah Datang dengan target capaian akhir 100%
- 6) Persentase Kepemilikan KK dengan target capaian akhir 100%
- 7) Persentase Kepemilikan KTP dengan target capaian akhir 95%

Sasaran kecamatan merupakan turunan dari tujuan RPJMD dan selaras dengan sasaran perangkat daerah serta adanya kesamaan program. dari hal tersebut dapat analisa permasalahan di kecamatan terhadap sasaran OPD sehingga diketahui tantangan dan peluang yang ada sebagaimana Tabel II.14 berikut :

**Tabel II.14**  
**Analisa Untuk Tantangan dan Peluang**

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KEKAMATAN		
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten	Masih kurangnya bentuk pelayanan petugas LINMAS terhadap jumlah masyarakat yang harus dilayani	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Tlogowungu yang mampu mempengaruhi masyarakat	Adanya Sinergitas dengan SATPOL yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan LINMAS
2	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa	1. LPMD di Desa masih banyak yang tidak diberdayakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa , sehingga mempengaruhi pembangunan yang ada dan berdampak pada lingkungan serta mempengaruhi Peningkatan produktivitas ekonomi desa, karena pemberdayaan	1. Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD 2. Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa 1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES 2. Peningkatan

		<p>2. Kurang berfungsinya koordinasi yang dilaksanakan oleh RT/RW terhadap permasalahan lingkungan di masyarakat</p>	<p>1. Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga</p> <p>2. Kesejahteraan yang sesuai bagi koordinator ditingkat terendah (RT/RW) belum ada perhatian/kebijakan dari pemerintah</p>	<p>BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet</p> <p>Adanya regulasi yang mengatur tentang kependudukan</p>
		<p>1. Masih banyak PKK dan Karang Taruna desa yang tidak berjalan/bergerak secara rutin</p> <p>2. Belum maksimalnya penyelenggaraan Posyandu di desa</p>	<p>1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata</p> <p>Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu</p>	<p>1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES</p> <p>1. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan</p>

				yang ada di masyarakat
3	Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	<p>1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Desa</p> <p>2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Kecamatan</p>	<p>1. Definisi operasioal tentang program/kegiatan di perangkat daerah dirumuskan lebih jelas</p> <p>1. Ketatnya proses verifikasi usulan kecamatan oleh OPD pengampu kegiatan</p>	<p>1. Adanya pembekalan pembelajaran bagi vasilitator penjangingan usulan kegiatan</p> <p>1. Adanya program Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dalam RKPD</p>
4	Prosentase realisasi capaian kinerja RKPD	Keterisian Data monografi kecamatan belum maksimal terpenuhi dan validasi data belum semuanya dapat pertanggungjawabkan	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	<p>1. Tersedianya base data dari BAPPEDA dan DISKOMINFO yang dapat dijadikan acuan data</p> <p>2. Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data indonesia</p>
5	Lama Proses Perizinan	Belum optimalnya pelayanan permohonan perijinan	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dari pemerintah daerah
6	Persentase Surat Keterangan Pindah Datang, KK dan KTP	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan	<p>Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan</p> <p>Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,</p>	Adanya pelimpahan kewenangan dari dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

Dari analisis diatas dapat dilihat tantangan dan peluang yang timbul dari permasalahan yang ada sebagai faktor dari luar sesuai dengan kondisi saat ini.

#### 2.4.2 Analisis KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Analisa Kecamatan Tlogowungu terhadap KLHS dilihat dari aspek sosial yaitu kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata dapat dirumuskan tantangan dan peluang yang ada seperti pada tabel berikut :

**Tabel II.15**

**Analisis KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan**

No.	ISU KLHS	Program Kecamatan	Tantangan	Peluang
	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	1. Ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD  1. Pemerataan pembangunan penunjang perekonomian	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Adanya Pengawasan dan evaluasi terhadap masa berlaku perizinan dari OPD terkait	Pelimpahan kewenangan terkait pelayanan perijinan di kecamatan

Tantangan tersebut diatas akan menjadi masukan dalam penentuan isu strategis dan peluang yang ada akan menjadi usulan dalam perumusan strategi pembangunan.

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor – faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tlogowungu**

Kecamatan Tlogowungu sesuai tugas dan fungsinya mengampu 4 (empat) misi sebagai bentuk dukungan kepada kepala daerah dalam menyelesaikan visi dan misi-nya. Misi yang terjemahkan dalam tujuan sudah menjadi ketetapan dalam RPJMD Kabupaten Pati, dari tujuan tersebut secara alur perencanaan diturunkan kedalam sasaran, strategi dan arah kebijakan menggunakan kerangka logis (cascading). Hasil dari alur perencanaan tersebut akan dilihat permasalahan yang ada sebagai berikut :

**Tabel III.1**

**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya Poskamling yang aktif dan masih kurangnya pelayanan anggota LINMAS kepada masyarakat	Rasio Poskamling dalam satu desa masih kurang dan rasio anggota LINMAS terhadap masyarakat masih belum memenuhi	Belum optimalnya koordinasi serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat
2	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan	Belum aktifnya LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu di desa	Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL),		
3	Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	<p>1. Penyaluran rastra, PKH kepada masyarakat desa yang membutuhkan masih kurang tepat, cepat dan efektif</p> <p>2. Pemerataan penyaluran bantuan keagamaan belum maksimal</p>	<p>1. Rendahnya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam penanggulangan kemiskinan diwilayah kecamatan</p> <p>1. Kurangnya koordinasi dalam penanganan masalah keagamaan diwilayah kecamatan</p>
4	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat belum sepenuhnya memuaskan	Lebih rendah/sedikit dokumen kependudukan yang dikeluarkan dibandingkan permintaan yang masuk
5	Belum optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	Masih rendahnya keterisian data dan validasi data monografi kecamatan serta profil kecamatan	Belum maksimalnya koordinasi pemetaan, pengumpulan dan verifikasi data yang dibutuhkan kecamatan dalam penyusunan monografi dan profil
6	Sedikitnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan tertampung dalam Musrenbang Kabupaten	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti dan menghadiri Musrenbang tingkat Desa serta Musrenbang tingkat Kecamatan	Belum pahamnya masyarakat akan kebutuhan yang prioritas dan batasan – batasan kewenangan untuk menjadi usulan dalam musrenbang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Masih sedikitnya usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadiri, mengikuti dan mengusulkan kebutuhan sesuai skala prioritas pada Musrenbang tingkat Desa dan Musrenbang tingkat Kecamatan	Belum pahamnya masyarakat akan kebutuhan yang menjadi prioritas wilayahnya  Belum pahamnya masyarakat terkait OPD yang menangani usulan mereka dan batasan – batasan kewenangan yang bisa diusulkan
7	Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang diberlakukan	Laporan keuangan desa masih banyak yang tidak tepat waktu dan belum semua desa menyusun laporan keuangan sesuai standar pelaporan	Belum maksimalnya pembinaan dan pendampingan pengelolaan administrasi keuangan desa yang diberikan
8	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	Masih rendahnya sistem/bentuk pelayanan perizinan kepada masyarakat	Masih rendah/lebih sedikit dokumen izin yang dikeluarkan dibandingkan permintaan perizinan yang ada

Dari tabel diatas dapat dilihat seberapa banyak permasalahan yang muncul dari misi yang didukung oleh Kecamatan Tlogowungu antara lain masalah pokok yang mencapai 8 masalah, masalah mencapai 10 masalah, dan akar masalah sebanyak 11 masalah.

Permasalahan yang ada akan didukung oleh data sebagai dasar adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tlogowungu. Data pendukung terbagi dalam tiga area yaitu data masalah pokok berisi data pembentuk dari indikator kinerja (sasaran), data masalah

berisi data pembentuk dari indikator kinerja (program) dan akar masalah yang merupakan data hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Tlogowungu, data dukung ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Data Dukung Masalah Pokok**

NO.	POKOK MASALAH	SATUAN	DATA SESUAI KEADAAN	DATA SESUAI KEADAAN
			2018	2019
1.	Jumlah pos kamling di Kecamatan Tlogowungu	unit	97	97
2.	Jumlah anggota linmas di Kecamatan Tlogowungu	orang	411	442
3.	Jumlah lembaga masyarakat yang ada di Kecamatan	lembaga	75	75
4.	Jumlah fakir/miskin di Kecamatan Tlogowungu	orang	-	3.468
5.	Jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan)	buah	20	45
6.	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan keseluruhan di Kecamatan Tlogowungu	buah	5.655	1.455
7.	Jumlah pelayanan perijinan keseluruhan di Kecamatan Tlogowungu	buah	26	66
8.	Jumlah data monografi kecamatan Tlogowungu yang terisi	buah	522	750
9.	Jmlah desa di Kecamatan Tlogowungu	desa	15	15
10.	Jumlah penduduk Kecamatan Tlogowungu	orang	50.734	51.181
11.	Jumlah rumah ibadah se Kecamatan Tlogowungu	unit	349	350

Data pendukung pada tabel masalah pokok diatas merupakan metadata dari formulasi indikator kinerja sasaran yang sudah dirumuskan

dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan jenis data yang sifat sebagai elemen data.

**Tabel III.3**  
**Data Dukung Masalah**

NO.	MASALAH	SATUAN	DATA SESUAI KEADAAN	
			2018	2019
1	2	3	4	5
1	Jumlah seluruh LPMD = 15. desa	lembaga	15	15
2	Jumlah PKK seluruhnya = 15 desa	lembaga	15	15
3	Jumlah karang taruna keseluruhan = 15 desa	lembaga	15	15
4	Jumlah RW se Kecamatan Tlogowungu	lembaga	52	71
5	Jumlah RT se Kecamatan Tlogowungu	lembaga	269	321
6	Jumlah posyandu se Kecamatan Tlogowungu	lembaga	15	15
7	Jumlah PKH se Kecamatan Tlogowungu	orang	-	3.468
8	Jumlah (rumah ibadah, takmir dll) yang seharusnya menerima bantuan keagamaan se Kecamatan Tlogowungu	unit	349	350
9	jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	orang	40	40
10	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	orang	40	40
11	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	orang	65	65
12	Jumlah laporan keuangan desa se Kecamatan Tlogowungu	dokumen	60	60

Data pendukung pada tabel masalah diatas merupakan metadata dari formulasi indikator kinerja program yang sudah dirumuskan dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan data yang sifatnya sebagai sub elemen data.

Tabel III.4

## Data Dukung Akar Masalah

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin laki - laki	orang	24.909	25.011
2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perempuan	orang	26.051	26.170
3	Jumlah Desa Tertinggal	desa	5	3
4	Jumlah Desa Berkembang	desa	10	12
5	Jumlah Desa Maju	desa	1	1
6	Jumlah Desa Agraris	desa	15	15
7	Jumlah Desa Industri	desa	0	0
8	Jumlah Desa Nelayan**	desa	0	0
9	Jumlah Desa Wisata	desa	3	3
10	Jumlah Aparat Linmas aktif	orang	225	248
11	Jumlah Aparat Linmas tidak aktif	orang	186	190
12	Jumlah Pos Kamling aktif	unit	23	25
13	Jumlah Pos Kamling tidak aktif	unit	74	72
14	Jumlah Karang Taruna (KT) aktif	lembaga	13	14
15	Jumlah Karang Taruna (KT) tidak aktif	lembaga	2	1
16	Jumlah PKK Aktif	lembaga	15	15
17	Jumlah PKK Tidak Aktif	lembaga	-	-
18	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Aktif	lembaga	15	15
19	Lembaga		-	-

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak Aktif	lembaga		
20	Jumlah RW aktif	lembaga	52	71
21	Jumlah RW tidak aktif	lembaga	-	-
22	Jumlah RT aktif	lembaga	269	321
23	Jumlah RT tidak aktif	lembaga	-	-
24	Jumlah Posyandu aktif	lembaga	15	15
25	Jumlah Posyandu tidak aktif	lembaga	48	48
26	Jumlah fakir/miskin penerima bantuan sesuai daftar penerima RASTRA (rastra, PKH)	orang	2.992	2.884
27	Jumlah penerima bantuan keagamaan sesuai daftar penerima	orang	349	350
28	Jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan) yang terealisasi dalam RKPD	usulan	20	45
29	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu yang terlayani	orang	5.655	6.455
30	Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu yang terlayani	ijin	26	66
31	Jumlah keterisian data monografi kecamatan	buah	522	660
32	Jumlah keterisian data profil desa	buah	522	660
33	Jumlah desa yang administrasi laporan pengelolaan keuangan desa tepat waktu	desa	13	13
34	Jumlah desa yang administrasi laporan		13	13

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
	pengelolaan keuangan desa yang sudah tertib dan sesuai standar	desa		
35	Jumlah Masjid se Kecamatan Tlogowungu	unit	61	62
36	Jumlah Langgar/Mushola se Kecamatan Tlogowungu	unit	236	283
37	Jumlah Gereja Kristen se Kecamatan Tlogowungu	unit	4	4
38	Jumlah Pura se Kecamatan Tlogowungu	unit	0	0
39	Jumlah Vihara Kecamatan Tlogowungu	unit	0	0
40	Jumlah Klenteng se Kecamatan Tlogowungu	unit	0	0

Data pendukung pada tabel akar masalah diatas merupakan metadata dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung realisasi kinerja dari target yang sudah direncanakan. data sifatnya sebagai sub elemen data.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pati periodetahun 2017-2022 adalah :

“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK.”

Visi tersebut diterjemahkan dengan 8 (delapan misi) untuk mewujudkan sebagai berikut :

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pati periode tahun 2017-2022:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ketercapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib didukung oleh Kecamatan Tlogowungu, diselaraskan dengan permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan pada sub bab 3.1 diatas untuk dasar penelaahan guna mendapatkan faktor – faktor penghambat dan pendukung yang ada di Kecamatan Tlogowungu:

**Tabel III.5**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Tlogowungu Kab. Pati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi I Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.	Masih rendahnya Poskamling aktif dan anggota Linmas aktif	Kurang pedulinya masyarakat terhadap manfaat poskamling	Kebijakan Kecamatan Tlogowungu dalam pengaktifan kembali poskamling  Adanya nggaran pembinaan LINMAS dari desa untuk

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Belum optimalnya pelayanan LINMAS sesuai tugas dan fungsinya di Kecamatan Tlogowungu	peningkatan kapasitas
2	MISI III Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan lingkungan di desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Data penerima bantuan sosial yang kurang valid  Belum optimalnya pemutakhiran data masyarakat fakir dan miskin	Labelisasi penerima bantuan yang bisa memperbarui penerima bansos  Adanya sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS - NG) yang sudah diterapkan di desa pada tahun 2019 di setiap desa
3	MISI IV Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Penggratisan biaya pengelolaan dokumen kependudukan  Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan oleh kecamatan
		Belum	Pandangan	Penyusunan perencanaan

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	sebelah mata terhadap pentingnya data dan informasi guna penyusunan monografi dan profil kecamatan	kecamatan yang sudah berdasarkan pada data dan informasi  Peningkatan SDM kecamatan terhadap pengelolaan data dan informasi
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten  Masih sedikitnya usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan  Petugas Fasilitator kecamatan belum optimal dalam memberikan pendampingan mengarahkan, dan mengkondisikan usulan masyarakat	Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan  Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang handal	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	MISI VI Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha  Banyaknya ijin usaha yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga di kecamatan	Penggratisan biaya pengurusan izin usaha selain IMB  Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi

Dari hasil telaahan tersebut dapat dilihat adanya faktor - faktor penghambat dan pendorong dari dalam Kecamatan Tlogowungu sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial kemasyarakatan.

Ketercapaian Program Kepala daerah yang menjadi kewajiban Kecamatan Tlogowungu untuk mendukungnya sesuai dengan keselarasan program di kecamatan sebagaimana berikut :

1. **Program masyarakat yang tertib, bersosial dan bermartabat** didukung oleh Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
2. **Program pemberdayaan masyarakat miskin** didukung oleh Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dan Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan.
3. **Program pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM** yang kompeten didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Pengembangan data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa.

4. **Program investasi daerah** didukung oleh program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

### **3.3 Telaahan RENSTRA Perangkat Daerah**

Telaahan terhadap RENSTRA Perangkat Daerah yang searah atau didukung oleh Kecamatan Tlogowungu ada 5 (lima) perangkat daerah kabupaten, telah berfungsi untuk mencari factor – factor penghambat dan pendorong dari dalam Kecamatan itu sendiri. Perangkat daerah juga merupakan pengampu urusan yang wajib menyusun RENSTRA Perangkat Daerah, hasil dari perencanaan mereka ditelaah dengan batasan kesesuaian tujuan, sasaran dan program di Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut :

1. SATPOL PP :

Tujuan Persentase Penanganan Pelanggaran K3.

Sasaran Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal dengan indikator Persentase Personil Linmas yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

2. DISPERMADES :

Tujuan Indek Desa Membangun (IDM).

Sasaran Indek Ketahanan Sosial, Indek Ketahanan Ekonomi, Indek Ketahanan Lingkungan.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif.

3. BAPPEDA :

Tujuan dari Persentase Realisasi Capaian RPJMD.

Sasaran Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD dan Prosentase realisasi capaian kinerja RKPD.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Pemsosbud yang tertampung dalam Renja dan

program Pengembangan Data/Informasi dengan indikator Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

4. DPMPTSP :

Tujuan Pertumbuhan Investasi Daerah.

Sasaran Lama Proses Perizinan.

Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan indikator prosentase Kesesuaian Perizinan.

5. DISPENDUKCAPIL

Tujuan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Kependudukan.

Sasaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pencatatan Sipil.

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Peningkatan Kepemilikan KTP, Persentase Kepemilikan KK dan Persentase Keterangan Pindah Datang.

Dilihat dari sisi sasaran perangkat daerah dapat ditelaah sesuai kompetensi yang mampu dilaksanakan oleh Kecamatan Tlogowungu sebagai bentuk dukungan guna ketercapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah saat periode RPJMD tahun 2017 – 2022, telaah sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel III.6  
Telaah RENSTRA Perangkat Daerah**

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten	Kurang maksimalnya Rasio Poskamling dan rasio anggota Linmas	Kurang pedulinya masyarakat akan arti pentingnya poskamling dan Linmas	Adanya anggaran dari desa untuk membina anggota Linmas dan pengaktifan poskamling
2	Prosentase lembaga kemasyarakata	Belum aktifnya LPMD, PKK,	Kurang antusiasme masyarakat	Adanya anggaran yang memadai untuk

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
	tan desa	Karang taruna, RT/RW dan Posyandu di desa	dalam mengaktifkan lembaga desa  Kurangya peran yang diberikan oleh desa terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat	operasional lembaga desa  Fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus/anggota lembaga pemberdayaan msyarakat
3	Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kurangya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan  Masih sedikit masyarakat yang memahami tata laksanakan dan ketentuan pengusulan kebutuhan masyarakat	Fasilitasi dari kecamatan terhadap pelaksanaan penjangangan dan musrenbang  Penyediaan tenaga fasilitator oleh kecamatan  Adanya pemilahan usulan prioritas untuk direalisasikan
	Persentase desa tertib administrasi pengelolaan keuangan	Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang diberlakukan	Kurangya kompetensi SDM pengelola administrasi keuangan desa  Sistem administrasi yang sudah aplikasi	Adanya Pendampingan/p elathan/bintek dalam penyelesaian proses administrasi keuangan
4	Lama Proses Perizinan	Belum maksimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha  Kurangya tenaga di	Penggratisan biaya pengurusan izin usaha skala kecil selain IMB  Kecamatan memiliki

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
			kecamatan untuk menunjang proses pelayanan	Kewenangan perijinan skala kecil  Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi  Sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan perijinan dan manfaat perijinan
5	Persentase Surat Keterangan Pindah Datang, KK, dan KTP	Belum maksimalnya pelayanan surat keterangan pindah datang, pelayanan kartu keluarga, pelayanan kartu tanda penduduk kepada masyarakat	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya administrasi kependudukan  Hasil dari pelayanan yang tidak langsung didapatkan oleh masyarakat karena hanya sebatas rekam data  Tidak adanya alat cetak KTP di Kecamatan	Penggratisan biaya pengurusan surat pindah datang  Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan  Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan

Dari hasil telaah tersebut penghambat yang timbul dari dalam akan dijadikan salah satu acuan dalam penentuan isu strategis Kecamatan Tlogowungu selain tantangan dari bab sebelumnya, dan pendorong yang dimiliki akan dijadikan pedoman strategi dalam penyelesaian hambatan.

### 3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari hasil telaah KLHS terhadap isu KLHS terkait aspek sosial dalam hal ini kemiskinan jika diselaraskan dengan program di Kecamatan Tlogowungu dapat dilihat perumusan penghambat dan pendorong yang ada sebagai berikut :

**Tabel III.7**  
**Telaah KLHS terhadap Kecamatan Tlogowungu**

No.	Isu KLHS	Program Kecamatan	Penghambat	Pendorong
	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	<p>1. Belum sepenuhnya tugas dan fungsi LPMD diberdayakan oleh pihak desa</p> <p>1. Pembangunan yang tidak sepenuhnya melibatkan LPMD akan kurang selaras dengan kebutuhan dalam peningkatan ekonomi desa</p>	<p>1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa</p> <p>2. Adanya kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa dari Pemerintah Daerah</p>
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses perizinan usaha	Program peningkatan iklim investasi menjadi salah satu sasaran kecamatan dala perencanaan

Hasil telaah KLHS terkait isu yang bisa ikut didukung penyelesaiannya oleh Kecamatan Tlogowungu akan berguna sebagai penyumbang masukan dalam perumusan isu dan penentuan strategi yang akan diimplementasikan dalam program/kegiatan.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan merupakan gabungan masalah masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Penentuan isu – isu strategis tidak lepas dari adanya hasil analisis dan telaah pada Visi dan misi, RENSTRA OPD yang terkait dengan perencanaan Kecamatan Tlogowungu dan RTRW, hasil analisis dan telaah yang dapat diambil adalah :

**TABEL III.8**  
**HASIL ANALISA, TELAHAH DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN**

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
1	Masih rendahnya Poskamling aktif dan anggota Linmas aktif	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Tlogowungu yang mampu mempengaruhi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang pedulinya masyarakat terhadap manfaat poskamling dan fungsi dari LINMAS</li> <li>2. Belum optimalnya pelayanan LINMAS sesuai tugas dan fungsinya di Kecamatan Tlogowungu</li> </ol>
2	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan lingkungan di desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD</li> <li>2. Pemerataan pembangunan penunjang perekonomian</li> <li>3. Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social untuk mencapai/menjadi desa mandiri</li> <li>2. Kurang antusiasme masyarakat dalam mengaktifkan lembaga desa</li> <li>3. Kurangnya peran serta yang</li> </ol>

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
		<p>Kabupaten Pati</p> <p>4. Pembangunan yang tidak sepenuhnya melibatkan LPMD akan kurang selaras dengan kebutuhan dalam peningkatan ekonomi desa</p> <p>5. Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga</p> <p>6. Kesejahteraan yang sesuai bagi koordinator ditingkat terendah (RT/RW) belum ada perhatian/kebijakan dari pemerintah</p> <p>7. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata</p> <p>8. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu</p>	<p>diberikan/dimanfaatkan oleh desa terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat</p>
	<p>Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat</p>	<p>Verifikasi akhir pendataan masyarakat miskin oleh pemerintah pusat</p>	<p>1. Data penerima bantuan sosial yang kurang valid</p> <p>2. Belum optimalnya pemutakhiran data masyarakat fakir dan miskin</p>
	<p>Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu</p>	<p>Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan</p> <p>Hak cetak saat ini ada di</p>	<p>Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan</p> <p>Hasil dari pelayanan</p>

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
		Disdukcapil,	yang tidak langsung didapatkan oleh masyarakat karena hanya sebatas rekam data  Tidak adanya alat cetak KTP di Kecamatan
	Belum optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	Banyaknya penambahan data dan perubahan yang sering diamanatkan oleh pemerintahan daerah, provinsi maupun pusat	Pandangan sebelah mata terhadap pentingnya data dan informasi guna penyusunan monografi dan profil kecamatan
	Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	1. Definisi operasional tentang program/kegiatan di perangkat daerah dirumuskan lebih jelas  1. Ketatnya proses verifikasi usulan kecamatan oleh OPD pengampu kegiatan	Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan kebutuhan prioritas  Petugas Fasilitator kecamatan belum optimal dalam memberikan pendampingan mengarahkan, dan mengkondisikan usulan masyarakat
	Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	Sistem pengelolaan keuangan dengan aplikasi	Kurang kompetensi SDM pengelola administrasi pengelolaan keuangan desa
	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi  Adanya Pengawasan dan evaluasi terhadap masa berlaku perizinan dari OPD terkait  Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	1. Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha  2. Banyaknya ijin usaha yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga di kecamatan  3. Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha  4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses perizinan usaha

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
			5. Kurangnya tenaga di kecamatan untuk menunjang proses pelayanan

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan sub isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan antara lain:

- 1) Kondusivitas pengurusan perizinan (misi vi)
- 2) Derajat Keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi (misi I)
- 3) kesejahteraan selanjutnya adalah Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan. Kelompok rentan dapat merujuk pada kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga rentan miskin, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan karena relasi gender yang belum setara dan adil. (misi III)
- 4) Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis teknologi informasi (*e-Government*)(misi IV administrasi kependudukan)
- 5) Isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis TI dengan data yang andal dan terbarukan (misi IV perencanaan dan data)

Dari hasil penyelarasan tersebut tersirat adanya kesamaan permasalahan di Kecamatan Tlogowungu dengan sub permasalahan daerah, sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis yang nantinya akan dijabarkan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Perumusan isu – isu strategis untuk Kecamatan Tlogowungu adalah sebagai berikut :

1. Isu reformasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Tlogowungu serta koordinasi dengan dinas terkait dalam mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat;

2. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban wilayah kecamatan dalam mendukung peningkatan perekonomian dan investasi;
3. Isu terkait peningkatan kualitas pembangunan (Kecamatan dan desa) serta lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
4. Isu terkait penguatan kelompok rentan dan penyetaraan gender.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tlogowungu**

Tujuan Kecamatan Tlogowungu yang diambil merupakan konsistensi terhadap RPJMD Kabupaten Pati periode tahun 2017 – 2022, dimana tujuan RENSTRA diambil dari sasaran RPJMD, perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Tlogowungu dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu :

- 1) Misi I yaitu meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. Tujuan terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan.

Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

- 2) Misi III yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Sasaran meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

- 3) Misi IV yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik.

Tujuan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah

kecamatan. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan, terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa.

- 4) Misi VI yaitu meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.

Tujuan terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan.

Penjabaran tujuan dan sasaran dari visi dan misi dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Tlogowungu selama lima tahun akan diterapkan dalam perencanaan RENSTRA sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel IV.1**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN TLOGOWUNGU**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi I : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal								
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermartabat di wilayah Kecamatan		Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100 %	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman danketertiban	Persentase pos kampling aktif	60%	63%	66%	70%	75%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase anggota Linmas aktif	60%	65%	70%	75%	77%
Misi III : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan								
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.		Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.600	0.650	0.660	0.660	0.670
			Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.730	0.734	0.750	0.765	0.770
			Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.658	0.662	0.665	0.665	0.670
			Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.550	0.577	0.600	0.605	0.610
		Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100%	100%	100%	100%
Misi IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik								

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase Realisasi Capaian RKPDes	65%	70%	75%	80%	85%
			Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes Kabupaten	6%	8%	9%	11%	12%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes kabupaten	6%	8%	9%	11%	12%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	89%	90%	91%	92%	93%
Misi VI : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri								
4	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan		Pertumbuhan pemohon Paten	45	50	50	55	60
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Tlogowungu, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2018 – 2022.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

**5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tlogowungu**

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi. Berdasarkan peluang dan pendorong yang didapatkan dari analisa pada Bab II dan telaah pada Bab III terhadap permasalahan yang ada akan dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel V.1  
Peluang dan Pendorong penentuan Strategi dan Arah Kebijakan

NO	PELUANG	PENDORONG
1	Adanya Sinergitas dengan SATPOL yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan LINMAS	Adanya anggaran dari desa untuk membina anggota Linmas dan pengaktifan poskamling
2	1) Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2) DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan	1) memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri 2) Anggaran yang memadai untuk

NO	PELUANG	PENDORONG
	<p>swadaya masyarakat dalam membangun desa</p> <p>3) Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES</p> <p>4) Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet</p> <p>5) Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES</p> <p>6) Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif merupakan target kinerja bagi DISPERMADES</p> <p>7) Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat</p>	<p>operasional lembaga desa</p> <p>3) Fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus/anggota lembaga pemberdayaan masyarakat</p> <p>4) Labelisasi penerima bantuan yang bisa memperbarui penerima bansos</p> <p>5) Adanya sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS – NG) yang sudah diterapkan di desa pada tahun 2019 di setiap desa</p>
3	<p>1) Adanya pembekalan pembelajaran bagi fasilitator penjangkaran usulan kegiatan</p> <p>2) Adanya program Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dalam RKPD</p> <p>3) Tersedianya base data dari BAPPEDA dan DISKOMINFO yang dapat dijadikan acuan data</p> <p>4) Terbitnya Permendagri tentang satu data indonesia</p>	<p>1) Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan</p> <p>2) Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)</p> <p>3) Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa</p> <p>4) Penyusunan perencanaan kecamatan yang sudah berdasarkan pada data dan informasi</p> <p>5) Peningkatan SDM kecamatan terhadap</p>

NO	PELUANG	PENDORONG
		<p>pengelolaan data dan informasi</p> <p>6) Penyediaan tenaga fasilitator oleh kecamatan</p> <p>7) Adanya pemilahan usulan prioritas untuk direalisasikan</p>
	Sistem keuangan yang terintegrasi	Adanya Pendampingan/pelathan/bintek dalam penyelesaian proses administrasi keuangan
4	<p>1) Pelimpahan kewenangan dari PEMDA Pati terkait Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro</p> <p>2) Kesesuaian Perizinan merupakan prioritas kinerja program dari DPMPTSP</p>	<p>1) Penggratisan biaya pengurusan izin usaha selain IMB</p> <p>2) Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi</p> <p>3) Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan oleh kecamatan</p> <p>4) Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan perijinan skala kecil</p> <p>5) Sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan perijinan dan manfaat perijinan</p> <p>6) Program peningkatan iklim investasi menjadi salah satu sasaran kecamatan dalam perencanaan</p>
5	Adanya pelimpahan kewenangan dari dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP	<p>1) Penggratisan biaya pengurusan surat pindah datang</p> <p>2) Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>3) Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan</p>

Dari peluang dan pendorong yang ada dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan lima tahunan Kecamatan Tlogowungu akan dapat ditentukan strategi dan arah kebijakan

dari penjabaran tujuan dan sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tlogowungu dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel V.2**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Visi : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik

Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kecamatan	1. Peningkatan koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum 2. Pemberdayaan dan penguatan peran Linmas.

Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa 2. Pengikutsertaan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sesuai tugas dan fungsinya
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	1. Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	1. Percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra dan PKH) dalam upaya mendukung penanggulangan

		2. Peningkatan koordinasi bantuan keagamaan penunjang ibadah masyarakat di wil. Kecamatan	kemiskinan. 2. Pelaksanaan evaluasi bagi masyarakat penerima bantuan kemiskinan 3. Optimalisasi dan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan keagamaan
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan kecamatan di segala aspek	1. Peningkatan SDM pelayanan administrasi kependudukan 2. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1. Pengembangan sistem data dan informasi 2. Optimalisasi sistem dan program perencanaan pembangunan	1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi 2. Peningkatan keterisian data monografi dan profil kecamatan 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 2. Perumusan kegiatan sesuai kewenangan dan kemampuan OPD dalam melaksanakan kegiatan

	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Peningkatan system dan tata kelola administrasi Keuangan Desa	1. Peningkatan SDM pengelola administrasi keuangan desa 2. Optimalisasi standar pelaporan administrasi keuangan desa
Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Optimalisasi pelayanan dan system pelayanan perizinan terpadu di Kecamatan	1. Peningkatan SDM pelayanan perijinan 2. Pelayanan gratis kepada masyarakat yang mengajukan perizinan

Hasil perumusan tujuan, sasaran , strategi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Tlogowungu dalam penyusunan perencanaan tahunan/RENJA perangkat daerah karena hal tersebut merupakan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**5.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan 5 (lima) tahunan , instrumen kebijakan tersebut berisi beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tlogowungu untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan dukungan alokasi anggaran sebagai bentuk legalitas atas diusulkan/dilaksanakannya kegiatan tersebut pada RENJA perangkat daerah. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk merialisasikan arah kebijakan yang sudah ditentukan, oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati**  
**Tahun 2018-2022**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100 %	191.833	100 %	229.412	100 %	252.733	100 %	263.428	100 %	290.578	100 %	1.227.984	Kecamatan Tlogowungu	
		4.08.4080.3.01.001	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	200 surat	200	1.050	200	1.050	200	1.155	350	1.837	400	2.625	1.350	7.717	Kecamatan Tlogowungu	
		4.08.4080.3.01.002	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	36 rekening	36	29.400	36	33.000	36	36.300	36	39.930	36	43.923	180	182.553	Kecamatan Tlogowungu	
		4.08.4080.3.01.006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	6 kendaraan dinas	6	2.000	7	2.200	10	2.800	10	3.100	12	3.450	46	13.550	Kecamatan Tlogowungu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.3.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	3 unit	3	3.066	3	3.250	3	3.575	3	4.000	3	4.400	15	18.291	Kecamatan Tlogowungu	
		4.08.4080.3.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	53 rim	60,rim,	7.015	65	9.750	67	10.725	68	11.797	70	12.976	330	52.263	Kecamatan Tlogowungu	
					494 buah	487		500		500		500		505		2.498			
					6 botol	8		10		10		10		10		48			
					63 dos	70		60		65		65		2867		315			
					6 pack	-		7		7		8		10		38			
		4.08.4080.3.01.011	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	500 buah	13.706 lembar	6.059	500	6.500	800	7.150	800	7.150	800	7.865	800	34.724	Kecamatan Tlogowungu	
					58 buku	56 buku		56		50		50		50		50			
					13.706 lembar	-		25.260		20.000		20.000		20.000		20.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.3.01.012	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	88 buah	88	2.339	60	2.500	60	2.750	60	3.025	60	3.327	328	13.941	Kecamatan Tlogowungu	
		4.08.4080.3.01.015	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	24 eksemplar	24	3.062	24	3.062	24	3.368	24	3.704	12	4.074	108	17.270	Kecamatan Tlogowungu	
		4.08.4080.3.01.016	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun	3500 liter	3,500	35.667	3600	37.500	3600	41.250	3600	45.225	3600	49.912	17.900	209.554	Kecamatan Tlogowungu	
					50 dos	50		50		100		150		150		500			
					96 galon	96		96		72		72		72		408			
					60 kg	30		60		90		90		90		390			
					70 pak	70		70		90		90		90		410			
		4.08.4080.3.01.018	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun	12 notulen rapat	12	39.385	12	64.100	12	70.510	12	70.510	12	77.561	60	322.066	Kecamatan Tlogowungu	
					552 laporan perjalanan	552		515		540		560		575		2.742			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.3.01.019	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	3 orang/bulan (selama 12 bulan)	3 orang	33.000	24	35.000	24	38.500	24	38.500	24	42.350	120	187.350	Kecamatan Tlogowungu	
		4.08.4080.3.01.022	Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	7 orang/bulan (selama 12 bulan)	7 orang	29.790	84	31.500	84	34.650	84	34.650	84	38.115	420	168.705	Kecamatan Tlogowungu	
		<b>4.08.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>124.675</b>	<b>80%</b>	<b>125.351</b>	<b>85%</b>	<b>138.726</b>	<b>85%</b>	<b>166.289</b>	<b>85%</b>	<b>182.047</b>	<b>85%</b>	<b>737.088</b>	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.02.005	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	6 unit	-	-	1	20.000	2	40.000	1	20.000	1	20.000	5	100.000	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun	2 unit	2	20.240	2	13.540	2	13.540	2	16.587	2	18.240	10	72.027	Kecamatan Tlogowungu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.40803.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kumulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun	10 paket/unit	10	55.541	2	3.250	-	-	10	56.530	10	56.530	32	146.447	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah kumulatifmebeleur yang diadakan selama setahun	4 unit	4	20.094	4	20.094	4	20.094	5	5.700	4	20.094	21	78.126	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.02.017	Pengadaan peralatan computer dan kelengkapannya	Jumlah kumulatif peralatan computer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun	1 unit	-	-	2	20.000	3	22.000	1	10.000	1	10.000	8	71.203	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas camat	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas selama setahun	1 unit pemeliharaan	-	-	1	10.752	1	10.752	1	11.827	1	6.536	4	39.867	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama setahun	2 unit pemeliharaan	-	-	2	22.400	10	24.640	2	27.104	2	29.814	16	103.958	103.958	
		408.40803.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama setahun	6 unit pemeliharaan (22 kali)	6	22.400	7	7.000	9	7.700	10	8.470	11	8.830	43	51.352	Kecamatan Tlogowungu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.40803.02.026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor selama setahun	0 unit pemeliharaan	-	-	10	2.670	10	-	10	2.937	6	3.500	36	9.107	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.02.028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor selama setahun	15 unit pemeliharaan	13	6.400	9	1.880	15	-	16	1.369	16	2.738	56	5.987	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.02.029	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur selama setahun	0 unit pemeliharaan	-	-	21	3.765	14	-	21	5.765	21	5.765	77	15.295	Kecamatan Tlogowungu	
		<b>4.08.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang mentaati aturan disiplin kerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9.600</b>	<b>100%</b>	<b>26.775</b>	<b>100%</b>	<b>29.322</b>	<b>100%</b>	<b>32.398</b>	<b>100%</b>	<b>33.608</b>	<b>100%</b>	<b>131.703</b>	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.03.002	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	20 stel	20	9.600	20	10.000	27	11.000	27	12.100	27	13.310	121	56.010	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.03.006	Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun	12 laporan	-	-	12	16.775	12	18.322	12	20.298	12	20.298	48	75.693	Kecamatan Tlogowungu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)	100%	100%	5.911	100%	6.550	100%	9.705	100%	9.714	100%	16.920	100%	48.800	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	12 dokumen	12	992	12	1.500	12	1.650	12	1.650	12	1.650	60	7.442	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 dokumen	1	1.212	1	2.450	1	2.695	1	2.964	1	3.260	5	12.581	Kecamatan Tlogowungu	
		408.40803.06.005	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja PD dan laporan evaluasi triwulan yang disusun selama setahun	10 dokumen	10	1.000	10	1.350	10	1.485	10	1.500	10	2.650	50	7.985	Kecamatan Tlogowungu	
					4 laporan evaluasi	4		4		4		4		4		20			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4 0803. 06.00 6	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksana Anggaran (DPA) SKPD	4 dokumen	4	1.714	4	1.250	4	1.375	5	3.600	5	6.360	22	14.299	Kecamatan Tlogowungu	
		408.4 0803. 06.00 7	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan perkembangan Kegiatan SKPD	10 laporan	12	993	-	-	-	-	-	-	-	-	12	993	Kecamatan Tlogowungu	
		408.4 0803. 06.01 0	Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) PD	1 dokumen	-	-	-	-	1	2.500	-	-	1	3.000	2	5.500	Kecamatan Tlogowungu	
<b>Prioritas 1</b>							<b>332.019</b>		<b>388.088</b>		<b>430.486</b>		<b>471.829</b>		<b>523.153</b>		<b>2.145.575</b>		
<b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																			
<b>BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN)</b>																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan				Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	24.509	100%	30.045	100%	35.045	100%	50.196	100%	62.500	100%	202.295	Kecamatan Tlogowungu	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban			Persentase Poskamling aktif	58%	60%	24.509	63%	30.045	66%	35.045	70%	50.196	75%	62.500	75%	202.295		
				Persentase Anggota Linmas Aktif	55%	60%		65%		70%		75%		77%		77%			
		4.08.16	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio poskamling	6,1	5,08	24.509	4,67	30.045	4,27	35.045	3,86	50.196	3,05	62.500	3,05	202.295	Kecamatan Tlogowungu	
				Rasio linmas	0,03	0,03		0,03		0,03		0,03		0,04		0,04			
		408.4080.3.16.006	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	12	24.509	12	30.045	12	35.045	12	50.196	12	62.500	60	202.295	Kecamatan Tlogowungu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan				Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.64	0.65	9.529	0.655	52.800	0.66	53.502	0.665	56.800	0.67	57.000	0.67	229.631	Kecamatan Tlogowungu	
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.740	0.750	9.529	0.755	52.800	0.760	53.502	0.765	56.800	0.770	57.000	0.770	229.631		
				Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.590	0.600		0.605		0.610		0.615		0.620		0.620			
				Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.580	0.590		0.595		0.600		0.605		0.610		0.610			
		4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	30%	40%	9.529	50%	52.800	60%	53.502	70%	56.800	75%	57.000	75%	229.631	Kecamatan Tlogowungu	
				Persentase PKK desa aktif	80%	82%		85%		86%		88%		90%		90%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
				<b>Persentase Karang Taruna aktif</b>	40%	44%		48%		58%		60%		65%		65%			
				<b>Persentase RT/RW aktif</b>	70%	73%		76%		78%		79%		80%		80%			
				<b>Persentase Posyandu aktif</b>	75%	78%		80%		83%		87%		90%		90%			
		408.4080.3.18.004	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan/paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12	9.529	12	52.800	12	53.502	12	56.800	12	57.000	60	229.631	<b>Kecamatan Tlogowungu</b>	
	<b>Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat</b>			<b>Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.</b>	--%	--%	-	100%	37.020	100%	23.514	100%	25.500	100%	29.329	100%	115.363		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan Tlogowungu	Persentase penyaluran rastra	--%	--%	-	100%	37.020	100%	23.514	100%	25.500	100%	29.329	100%	115.363	Kecamatan Tlogowungu	
				Persentase penyaluran PKH	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmirdll)	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
		408.4080.3.22.001	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Tlogowungu	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Tlogowungu	-- Laporan	-	-	12	37.020	12	23.514	12	25.500	12	29.329	48	115.363	Kecamatan Tlogowungu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan				Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tlogowungu	70%	60%	3.744	65%	24.500	70%	26.800	75%	27.500	80%	29.000	80%	111.544	Kecamatan Tlogowungu	
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	70%	65%		70%		75%		80%		85%		85%	-	Kecamatan Tlogowungu	
				Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes kabupaten	4%	6%		8%		9%		11%		12%		12%		Kecamatan Tlogowungu	
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan			Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	3.744	100%	24.500	100%	26.800	100%	27.500	100%	29.000	100%	111.544	Kecamatan Tlogowungu	
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	3.744	100%	24.500	100%	26.800	100%	27.500	100%	29.000	100%	111.544		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4080.3.17.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	5000 dokumen kependudukan	5.500	3.744	5.600	24.500	5.700	26.800	5.800	27.500	5.900	29.000	28.500	111.544	Kecamatan Tlogowungu	
	<b>Terpenuhiya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan</b>			<b>Persentase keterisian data monografi dan profil Kecamatan Tlogowungu</b>	50%	60	-	65	19.000	70	19.500	75	20.500	80	24.820	80	83.820		
		4.08.15	<b>Program Pengembangan data/Informasi</b>	<b>Persentase keterisian data monografi Kecamatan Tlogowungu</b>	75%	78%	-	80%	19.000	82%	19.500	85%	20.500	86%	24.820	86%	83.820	Kecamatan Tlogowungu	
				<b>Persentase keterisian data profil Kecamatan Tlogowungu</b>	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		Kecamatan Tlogowungu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4080.3.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan Tlogowungu	Jumlah dokumen data Kecamatan Tlogowungu (profil dan monografi Kecamatan Tlogowungu) yang disusun selama setahun	2 dokumen	-	-	2	19.000	2	19.500	2	20.500	2	24.820	10	83.820	Kecamatan Tlogowungu	
	<b>Terpenuhiya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan</b>			<b>Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten</b>	4%	6%	14.027	8%	35.500	9%	37.500	11%	38.000	12%	42.000	12%	167.027		
		4.08.21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa</b>	60%	65%	14.027	75%	35.500	78%	37.500	80%	38.000	82%	42.000	82%	167.027	Kecamatan Tlogowungu	
				<b>Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan Tlogowungu</b>	80%	82%		85%		87%		90%		92%		92	-	Kecamatan Tlogowungu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.40803.21.009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan Tlogowungu	2 Dokumen	2	14.027	2	35.500	2	37.500	2	38.000	2	42.000	10	167.027	Kecamatan Tlogowungu	
	<b>Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa</b>			<b>Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib</b>	88%	89%	16.122	90	30.122	91	54.000	92	57.500	93	62.000	93	235.866	Kecamatan Tlogowungu	
		<b>4.08.19</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>	<b>16.122</b>	<b>92%</b>	<b>30.122</b>	<b>93%</b>	<b>54.000</b>	<b>94%</b>	<b>57.500</b>	<b>95%</b>	<b>62.000</b>	<b>95%</b>	<b>219.744</b>	Kecamatan Tlogowungu	
				<b>Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan</b>	<b>75%</b>	<b>77%</b>		<b>79%</b>		<b>81%</b>		<b>83%</b>		<b>85%</b>		<b>85%</b>			
		408.40803.19.004	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	3 laporan / rekomendasi	3	16.122	3	30.122	3	54.000	3	57.500	3	62.000	15	219.744	Kecamatan Tlogowungu	
<b>Terwujudnya kualitas pelayanan kepada</b>				<b>Pertumbuhan pemohon Paten</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>6.943</b>	<b>45</b>	<b>31.875</b>	<b>50</b>	<b>39.500</b>	<b>55</b>	<b>41.154</b>	<b>60</b>	<b>45.000</b>	<b>60</b>	<b>164.472</b>	Kecamatan Tlogowungu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan			Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	6.943	100%	31.875	100%	39.500	100%	41.154	100%	45.000	100%	164.472	Kecamatan Tlogowungu	
		4.08.20	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	6.943	100%	31.875	100%	39.500	100%	41.154	100%	45.000	100%	164.472	Kecamatan Tlogowungu	
		408.4080.3.20.010	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Tlogowungu (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	70 dokumen	70	6.943	80	31.875	90	39.500	100	41.154	110	45.000	450	164.472	Kecamatan Tlogowungu	
		408.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase pelayanan kesehatan anak balita yang terlayani	100%	100%	2.944	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	2.944	Kecamatan Tlogowungu	
		408.4080.3.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah laporan penyuluhan anak balita yang disusun	15 laporan	15	2.944	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.944	Kecamatan Tlogowungu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
<b>PRIORITAS III</b>						77.818		260.862		289.361		317.150		351.649		1.296.840			
<b>JUMLAH P-I DAN P-III</b>						409.837		648.950		719.847		788.979		874.802		3.256.242			

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kecamatan Tlogowungu yang mengacu pada sasaran RPJMD sebagai tujuan dalam RENSTRA Kecamatan Tlogowungu yang diturunkan ke dalam sasaran dan program dengan indikator serta target kinerja yang sudah ditentukan dengan formula yang terukur, indikator kinerja ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.</b>							
	<b>Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan.</b>							
	INDIKATOR TUJUAN 1							
1	<b>Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran I : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan</b>							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>ketertiban</b>							
	INDIKATOR SASARAN 1							
1.1	Persentase pos kampling aktif	58%	60%	63%	66%	70%	75%	75%
	Persentase anggota Linmas aktif	55%	60%	65%	70%	75%	77%	77%
	<b>Sasaran Program : Terwujudnya Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kecamatan</b>							
1.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Rasio pos kampling aktif	3,2	4,1	4,5	4,8	5,0	5,5	5,5
	Rasio anggota Linmas aktif	0,03	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,035
	<b>Misi 3 :Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan</b>							
	<b>Tujuan : Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan</b>							
2	INDIKATOR TUJUAN 1							
	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.59	0.60	0.65	0.66	0.665	0.67	0.67
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kepada masyarakat							
	<b>Sasaran : Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan</b>							
2.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.720	0.730	0.735	0.740	0.745	0.750	0.750
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.600	0.658	0.662	0.660	0.665	0.670	0.670
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.540	0.550	0.577	0.600	0.605	0.610	0.610
2.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	<b>Sasaran Program : Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan</b>							
	Persentase LPMD aktif	30%	40%	50%	60%	70%	75%	75%
	Persentase PKK desaaktif	80%	82%	85%	86%	88%	90%	90%
	Persentase Karang Taruna aktif	40%	44%	48%	58%	60%	65%	60%
	Persentase RT/RW aktif	70%	73%	76%	78%	79%	60%	60%
	Persentase Posyandu aktif	75%	78%	80%	83%	87%	90%	90%
	<b>Sasaran2 :Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat</b>							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>(rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.</b>							
2.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran Program 2 :</b>							
	<b>Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan</b>							
	<b>Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan</b>							
	<b>Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan keagamaan penunjang kebutuhan ibadah masyarakat di wilayah Kecamatan</b>							
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 2 :							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase penyaluran rastra	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran PKH	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir, dll)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik</b>							
	<b>Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan</b>							
3	INDIKATOR TUJUAN 3							
	<b>Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan</b>	70%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
	<b>Persentase Realisasi Capaian RKPDes</b>	70%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	<b>Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes kabupaten</b>	4%	6%	8%	9%	11%	12%	12%
	<b>Sasaran I : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan</b>							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentas e pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran Program 1 : Meningkatnya pelayanan adminsitration kependudukan kecamatan (KTP, KK)</b>							
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran 2: Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan</b>							
3.2	INDIKATOR SASARAN 2.1							
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
	<b>Sasaran Program 2.1 :</b>							
	- <b>Tersedianya data monografi kecamatan</b>							
	- <b>Tersedianya data profil kecamatan</b>							
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 2.1							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase keterisian data monografi kecamatan	75%	78%	80%	82%	85%	86%	86%
	Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
3.3	INDIKATOR SASARAN 2.2							
	<b>Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten</b>	4%	6%	8%	9%	11%	12%	12%
	<b>Sasaran Program : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan</b>							
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	75%	78%	80%	82%	82%
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%	85%	87%	90%	92%	92%
	<b>Sasaran 3 : Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa</b>							
3.4	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase desa dengan administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
	<b>Sasaran Program : Terciptanya administrasi</b>							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>pengelolaan keuangan desa yang tertib</b>							
3.4.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%
	<b>Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri</b>							
	<b>Tujuan : Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan</b>							
4	INDIKATOR TUJUAN 4							
	Pertumbuhan pemohon Paten	35	40	45	50	55	60	60
	<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan</b>							
4.1	INDIKATOR SASARAN 1							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran Program : Persentase pelayanan perizinan yang terlayani</b>							
4.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**BAB VIII**  
**P E N U T U P**

Renstra Perubahan Kecamatan Tlogowungu dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi saat ini, serta masukan dari aspirasi masyarakat guna mendukung ketercapaian RENSTRA Kecamatan Tlogowungu.

Renstra Perubahan Kecamatan Tlogowungu Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang berisikan penjabaran visi dan misi Kecamatan selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pati.

Perubahan Renstra Kecamatan Tlogowungu tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilalui yaitu tahun 2018 dan 2019. Hasil pelaksanaan Perubahan Renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Kecamatan Tlogowungu dalam merealisasikan target kinerja yang sudah ditetapkan. Penyusunan Renstra Kecamatan Tlogowungu pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu serta perencanaan periode berikutnya guna mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM,



SITI-SUBIATI, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19204241997032010